

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Bergulirnya reformasi di segala bidang khususnya reformasi birokrasi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini telah membawa dampak yang besar terhadap pola pembangunan dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk jawaban atas tuntutan masyarakat dan berbagai pihak dan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja birokrasi dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Salah satu dampak yang dapat dirasakan dari reformasi birokrasi adalah dalam bidang pembangunan fisik yang telah melahirkan pola baru yang mana pembangunan tidak hanya ditentukan dan dilaksanakan oleh satu pihak dalam hal ini pemerintah, tetapi dilakukan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan di dalamnya mulai dari masyarakat, pemerintah di semua tingkatan, pihak akademisi, swasta dan stakeholders lain di wilayah pembangunan itu dilaksanakan. Pola ini lebih dikenal dengan pendekatan kolaborasi (*collaborative governance*).

Collaborative governance dapat dimaknai sebagai salah satu regulasi yang berkaitan dengan beberapa lembaga, *stakeholders* atau para pemangku kepentingan untuk mensepakati atau menerapkan serta mengerjakan sebuah tindakan yang membutuhkan kesepakatan kolektif dan bersifat formal dengan pendekatan kesepakatan atau musyawarah untuk membuat atau

mengimplementasikan kebijakan public atau mengelola program atau aset publik (Ansell dan Gash. 2007).

Pendekatan pembangunan ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan pola pembangunan yang selama ini banyak dilakukan di Indonesia khususnya pada era sebelum reformasi dimana pembangunan sepenuhnya ditentukan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai objek. Adapun pola pembangunan yang terjadi dewasa ini telah menempatkan masyarakat sebagai subjek di semua tingkatan dan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan tahapkeberlanjutan.

Selain dilihat dari tinjauan teori, kolaborasi ternyata telah menjadi prinsip pembangunan itu sendiri yang tertuang di dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan salah satunya terdapat di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang juga terlahir sebagai buah dari reformasi birokrasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam menegaskan bahwa menjelaskan pembangunan perdesaan merupakan satu keterpaduan dengan sistem perkotaan.

Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa bahkan sebaliknya dari desa sampai tingkat pusat melalui sebuah konsesus (UU.No 6 Tahun 2014).

Isi dari pasal tersebut telah menyiratkan agar pembangunan dilakukan secara kolaborasi yang didalamnya juga terdapat prinsip partisipasi. Maka konsep kolaborasi dalam hal ini sebenarnya sangat luas, tidak hanya pada perencanaan, partisipasi tetapi juga mencakup masalah pembiayaan yang dilakukan melalui swadaya masyarakat maupun dilakukan dengan biaya dari pihak lain yaitu dengan model channelling. Berlakunya pola tersebut telah melahirkan banyak inovasi di masyarakat khususnya pemerintahan dan masyarakat desa yang telah diberikan wewenang secara khusus untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa keluar dari koridor undang-undang yang berlaku. Salah satu inovasi itu adalah adanya keinginan untuk menciptakan destinasi wisata di masing-masing desa yang dibiayai oleh dana desa dalam rangka untuk meningkatkan sumber pendapatan desa.

Pemerintah Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu pemerintahan desa di Kabupaten Ponorogo yang telah memanfaatkan kesempatan dengan baik. Melalui kolaborasi telah melakukan pembangunan destinasi agrowisata sebagai salah satu daya tarik tersendiri dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan desa secara mandiri.

Kegiatan pembangunan tersebut menjadi menarik karena lahan yang dibangun adalah bekas lahan lokalisasi atau dapat dikatakan sebagai alih fungsi. Hal ini juga merupakan salah satu peningkatan kualitas pembangunan serta penerapan prinsip pembangunan yang bermoral, berkeadilan dan

universal. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program.

Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. (Purwanti, 2016).

Keberhasilan pembangunan destinasi agrowisata yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kedung Banteng tidak lepas dari kolaborasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya. Kegiatan tersebut juga telah menarik perhatian Pemerintah Daerah dan pihak swasta dalam hal ini Bank untuk turut serta mensukseskan melalui berbagai perhatian dan bantuan baik moril maupun materiil.

Permasalahan yang dijelaskan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan masalah yang ada dan mengambil judul penelitian : **"Collaborative governance dalam Pembangunan Destinasi Agrowisata Kedung Banteng (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Eks. Lokalisasi Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul yang ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *collaborative governance* dalam Pembangunan Destinasi Agrowisata Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo?
2. Faktor apa saja yang menunjang pelaksanaan *collaborative governance* dalam Pembangunan Destinasi Agrowisata Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo?
3. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan *collaborative governance* dalam Pembangunan Destinasi Agrowisata Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bentuk pelaksanaan *collaborative governance* dalam Pembangunan Destinasi Agrowisata Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo.
2. Mengetahui faktor apa saja yang menunjang pelaksanaan *collaborative governance* dalam Pembangunan Destinasi Agrowisata Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo.

3. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan *collaborative governance* dalam Pembangunan Destinasi Agrowisata Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab adanya berbagai permasalahan di dalam masyarakat sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya adalah :

1. Bagi mahasiswa

Penelitian ini merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa untuk mempraktikkan berbagai teori yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan sehingga bias memahami kondisi ideal dengan kondisi yang ada di masyarakat atau fakta sebenarnya.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan evaluasi terhadap berbagai program yang selama ini telah dijalankan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan destinasi agrowisata kedung banteng ini sehingga pemerintah desa mengetahui mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu dicarikan terobosan lain demi keberhasilan pembangunan.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap sumbangan pemikiran serta cakrawala berfikir melalui penelitian sehingga akan lebih memperkaya khasanah berfikir serta penelitian yang

akan bermanfaat bagi penilaian keputusan serta bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah memiliki fungsi agar terdapat batasan-batasan istilah maupun variable sehingga penelitian tidak bias. Penegasan istilah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Collaborative governance*

Menurut Ansell dan Gash (2007) *collaborative governance* adalah rangkaian pengaturan atau regulasi yang mengatur beberapa lembaga publik, *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan formal, berdasarkan musyawarah dan atau kesepakatan. *Collaborative governance* yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah keterlibatan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten, tokoh Masyarakat, pihak swasta, masyarakat dan *stakeholders* yang lain dalam rangka mensukseskan kegiatan pembangunan agrowisata alih fungsi lahan eks lokasi Desa Kedung Banteng Ponorogo.

2. Destinasi Wisata

Destinasi wisata merupakan salah satu wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa tempat atau daya tarik wisata yang dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas serta terdapat peran masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya tujuan kepariwisataan (UU. No. 10 Tahun 2009). Berdasarkan definisi tersebut, maka destinasi wisata yang

dimaksud adalah kawasan lahan eks lokasi kedung banteng yang dialihfungsikan sebagai pembangunan agrowisata.

3. Agrowisata

Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensial berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.

Agrowisata memiliki tujuan salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan di berbagai bidang termasuk pangan, hortikultura, perkebunan dan sejenisnya. Dengan berkembangnya agrowisata di satu daerah tujuan wisata akan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintahan dengan kata lain bahwa fungsi pariwisata dapat dilakukan dengan fungsi budidaya pertanian dan pemukiman pedesaan dan sekaligus fungsi konservasi (Sastrayuda, 2010).

F. Landasan Teori

1. Teori Perencanaan Pengembangan Wilayah

Perencanaan Wilayah merupakan proses atau salah satu tahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga pembangunan yang akan dijalankan selalu mengarah kearah yang lebih baik bagi objek maupun subjek pembangunan itu sendiri (masyarakat) yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi, Dkk. 2004).

Salah satu fungsi dari perencanaan wilayah adalah dalam rangka untuk menaikkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan, ketimpangan lain, meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Jhingan, 2012).

Perencanaan dalam konteks pembangunan daerah merupakan usaha sistematis antara berbagai pelaku baik dari pemerintah, swasta, dan berbagai *stakeholders* pada tingkatan yang berbeda dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau pembangunan itu sendiri dengan cara:

- a. Melakukan analisis pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan;
- b. Memberikan rumusan dari tujuan atas kebijakan pembangunan itu sendiri;
- c. Selalu melakukan penyusunan strategi pada setiap tahapan pembangunan dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan,

- d. Memperhatikan sumber daya atau potensi yang ada di lahan pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka memantapkan capaian kesejahteraan masyarakat (Solihin, 2005).

Menurut Archibugi (2008) dalam Yulfa (2012) membagi perencanaan wilayah berdasarkan penerapannya menjadi empat komponen yaitu :

- a. Perencanaan fisik.

Perencanaan fisik yang dimaksud di sini lebih mengarah kepada rencana tata ruang wilayah yang melibatkan masalah-masalah fisik seperti jaringan jalan, jaringan drainase, taman kota dan sejenisnya. Perencanaan ini perlu dilakukan untuk mengkonsolidasikan data-data yang dimiliki oleh instansi terkait khususnya dalam hierarki birokrasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

- b. Perencanaan ekonomi makro.

Perencanaan pembangunan harus selalu memperhatikan nilai ekonomis yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara umum melalui pendekatan ekonomi makro. Kata lainnya adalah harus memperhatikan sisi kebermanfaatan bagi distribusi, perdagangan serta manfaat lain yang berkaitan dengan ekonomi suatu wilayah.

- c. Perencanaan Sosial.

Perencanaan ini lebih memperhatikan sisi demografis masyarakat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Dengan memperhatikan masalah-masalah sosial yang ada maka perencanaan

pembangunan akan memastikan bahwa keberadaan pembangunan adalah sebagai sebuah solusi bukan malah menambah persoalan-persoalan di dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial.

- d. Perencanaan Pembangunan. Perencanaan ini merupakan akumulasi dari semua perencanaan yang telah dilakukan sehingga dalam hal ini sudut pandangnya adalah komprehensif memandang semua persoalan yang ada di dalam masyarakat.

2. Pengertian *Collaborative Governance*

Collaborative governance terdiri dari dua suku kata, “*collaborative*” dan “*governance*”. Kata “*governance*” merupakan istilah yang merujuk pada pemerintahan. Sejauh ini banyak penelitian dan pendapat para ahli yang mendefinisikan istilah “*governance*” dengan pengertian yang berbeda-beda (Sumarto, 2003). *Collaborative governance* merupakan aktivitas yang di dalamnya untuk melibatkan kepentingan berbagai pihak untuk tercapainya tujuan atau kesepakatan bersama (Subarsono, 2016). Pengertian selanjutnya dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) yang mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets” (Ansell dan Gash, 2008).

(Pengatur yang mengatur pada satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta hal itu bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen program-program atau aset publik).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut Dwiyanto (2011) menjelaskan bahwa dalam model kolaborasi terdapat penyampaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara masing-masing pihak tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dalam mengelola organisasinya walaupun tunduk pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011)

Berdasarkan pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah pola kerja yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan pembagian peran yang baik tanpa mengurangi otoritas dan kewibawaan organisasi masing-masing.

3. Dimensi *Collaborative Governance*

Menurut Balogh (2011) *collaborative governance* memiliki beberapa dimensi diantaranya adalah *system context*, *drivers*, dan dinamika kolaborasi.

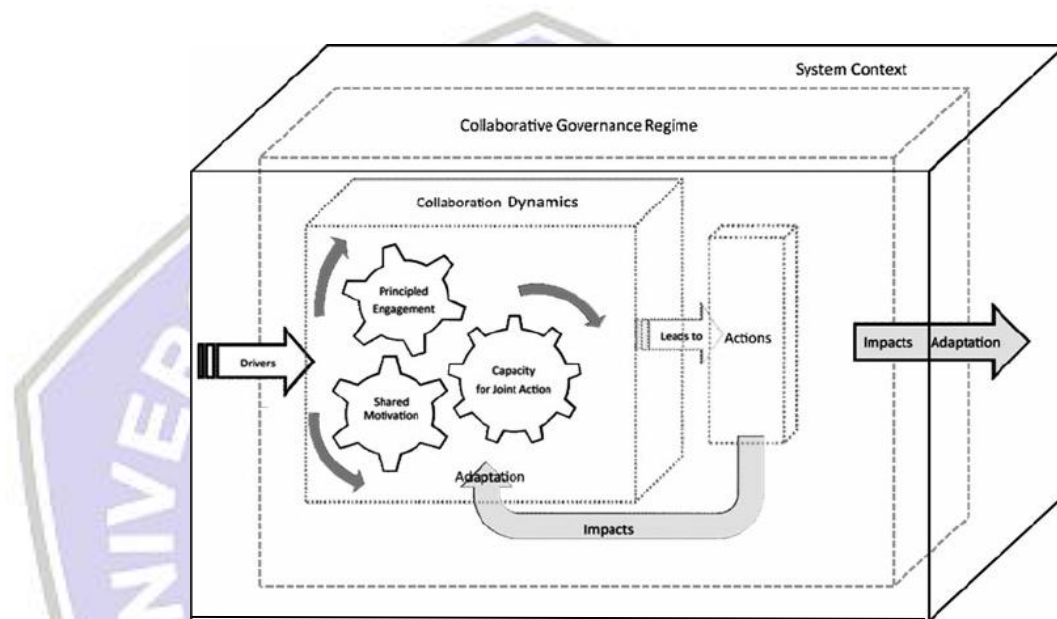
a. *System contexts* merupakan ruang lingkup yang menaungi. *System contexts* ini memiliki 7 elemen yaitu:

- 1) Sumber daya yang dimiliki
- 2) Kebijakan dan kerangka hukum

- 3) Konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan
 - 4) Sosioekonomi; kesehatan; budaya; dan ragam,
 - 5) Kegagalan yang ditemui di awal
 - 6) Dinamika politik, dan
 - 7) Jaringan yang terkait.
- b. *Drivers* merupakan bagian dari konsep *collaborative governance* yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi. *Drivers* memiliki 4 komponen yaitu:
- 1) *Leadership*, komponen ini membicarakan tentang keberadaan seorang pemimpin yang menyiapkan berbagai sumber daya yang ada dalam menjalankan tugasnya di dalam konteks kolaborasi.
 - 2) *Consequential incentives*, mengarah pada persoalan kepentingan, kesempatan, dan sumber daya serta ancaman, kesempatan situasional dan non situasional serta krisis yang mungkin akan terjadi dalam kerangka kolaborasi.
 - 3) *Interdependence*, kondisi ini terjadi ketika terdapat pihak dalam kolaborasi yang tidak mampu memainkan perannya dalam mencapai sebuah tujuan.
 - 4) *Uncertainty*, hal ini adalah sebuah tantangan ketika di dalam kolaborasi terdapat ketidakpastian baik yang timbul dari intern maupun dari ekstern.
- c. Dinamika kolaborasi terdiri dari tiga komponen, yaitu *principled engagement*, *shared motivation*, *capacity for joint action* keterlibatan

berprinsip, motivasi bersama, kapasitas untuk aksi bersama (Purwanti, 2016).

Teori proses kolaborasi atau menjelaskan tahapan-tahapan di dalam kolaborasi atau disebut dengan siklus kolaborasi. Siklus kolaborasi yang dimaksud dapat dilihat di dalam gambar berikut (Simbolon, Dkk. 2017) :



Gambar 1. Teori Proses Kolaborasi

Sumber : Simbolon, Dkk (2017)

Proses kolaborasi di atas yang dimaksud beradadalam kotak CGR. Penelitian ini menggunakan berbagai komponen dalam CGR untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diantaranya adalah :

a. **Dinamika Kolaborasi**

Beberapa ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi.

Berlawanan dengan Ansell dan Gash (2008) serta Thomson dan Emerson (2013) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang iteratif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain : Penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama.

b. Tindakan-tindakan dalam Kolaborasi

Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *collaborative governance*. Tindakan-tindakan kolaborasi pada praktiknya sangat beragam seperti pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perijinan, pengumpulan sumber daya, monitoring sistem/ praktik manajemen baru, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil dari tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang.

Menurut Huxam dalam Emerson (2012), beberapa tindakan kolaborasi memiliki tujuan sangat luas seperti penentuan langkah strategis dalam isu/bidang kebijakan kesehatan. Namun banyak pula tindakan kolaborasi yang memiliki tujuan sempit seperti proyek pengumpulan dan analisis informasi spesifik. Tindakan kolaboratif ada yang dapat dilakukan secara sekaligus oleh seluruh stakeholders ada pula yang hanya bias dilakukan oleh

stakeholder tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing stakeholder.

c. Dampak dan Adaptasi Hasil Tindakan pada Dinamika

Kolaborasi Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi

Dimensi kolaborasi di dalam pembangunan kawasan agrowisata ini juga relevan dengan Surat Edaran E DJCK No 40 tahun 2016 tentang prinsip kolaborasi yang mendasari dalam penanaman perumahan dan permukiman kumuh adalah (Rosyida, Dkk. 2017) :

a. Partisipasi

Partisipasi mengandung arti bahwa berbagai pihak yang ada memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat, memutuskan sebuah keputusan dan bertanggung jawab atas apa yang menyangkut hajat hidupnya secara adil dan sama tanpa ada perbedaan di dalamnya.

b. Akseptasi

Akseptasi lebih dimaknai sebagai sebuah kesetaraan dimana kehadiran berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat harus

diterima oleh pihak yang lain. Untuk mencapai keinginan tersebut maka kepada tiap pihak dituntut untuk bertanggung jawab/*accountable*.

c. Komunikasi

Komunikasi lebih kepada penyampaian rencana kerja yang dilakukan oleh semua pihak yang ada terhadap sebuah permasalahan yang dihadapi sehingga tercipta pola sinergi. Agar tujuan itu tercapai secara maksimal maka semua pihak perlu melakukan kolaborasi atau melebur menjadi satu.

d. Percaya

Kepercayaan adalah modal dasar dari sebuah kerjasama atau kolaborasi. Masing-masing stakeholders harus saling menghargai dan mempercayai. Maka dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi tujuan tersebut akan tercapai dengan baik.

e. Berbagi

Berbagi yang dimaksud di dalam konteks ini lebih kepada *sharing knowledge* yaitu berkaitan dengan pemikiran, ide maupun gagasan. Semua pihak harus bersedia untuk memberi dan menerima masukan saran dan kembangkan ritik yang bersifat (Rosyida, Dkk. 2017).

4. Agrowisata

Agrowisata adalah salah satu rencana kegiatan yang mengintegrasikan sistem pertanian dan pariwisata sehingga melahirkan salah satu kawasan wisata yang menarik. Menurut Nurisyah (2001), secara

spesifik agrowisata adalah tahapan-tahapan atau rangkaian pembentukan objek wisata yang memanfaatkan lahan dan berfungsi dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengalaman dan pengetahuan di bidang pertanian ini. Selanjutnya Sutjipta (2001) mengartikan agrowisata sistem kegiatan yang terpadu dan terkordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian dengan tujuan pokok untuk pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa agrowisata merupakan bentuk khusus pariwisata di lokasi usaha tani rumah tangga yang dapat berdampak ganda terhadap aspek sosial-ekonomi dan permukaan areal pedesaan.

5. Tujuan dan Pendekatan Pengembangan Agrowisata

Pengembangan kawasan agrowisata memiliki beberapa tujuan diantaranya dikemukakan oleh Rohman, Dkk (2017) adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan agrowisata adalah upaya untuk tujuan jangka panjang yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelestarian alam serta segala sumber daya yang dimilikinya.
- b. Merupakan salah satu kerangka dasar untuk perencanaan pembangunan kepariwisataan masa depan.
- c. Meningkatkan daya tawar sumber daya local, wahana wisata dan juga pengembangannya sehingga akan banyak mendatangkan kemaslahatan bagi warga masyarakat dan pemerintah pada khususnya.

Selanjutnya menurut Gumelar (2010), pendekatan pengembangan agrowisata meliputi :

- a. Agrowisata tidak boleh merusak keaslian ekosistem dan harus tetap melestarikan sumber daya alam, lingkungan dan cagar budaya yang ada di tempat pembangunan agrowisataa.

- b. Pengembangan agroowisata harus menguntungkan petani dan penduduk setempat sehingga fungsinya tidak hanya sebagai wahana wisata tetapi juga mengakomodir kebutuhan masyarakat dan petani khususnya dalam bidang pemasaran produk pertanian.
- c. Daerah yang sudah dibangun sebagai kawasan agrowisata harus ditetapkan sebagai daerah binaan sehingga akan berkelanjutan.
- d. Dalam pengembangan dan pengelolaan agrowisata harus melibatkan lembaga kepariwisataan dan lembaga pertanian baik milik pemerintah maupun non pemerintah

6. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Agrowisata

Peran masyarakat dalam aktivitas pengelolaan dan pengembangan kawasan agrowisata sangat penting sehingga tercipta rasa kepemilikan untuk menjaga eksistensi objek serta melestarikan lingkungan pada kawasan agrowisata di daerahnya. Peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan agrowisata dapat dilakukan melalui (Utama, 2015) :

- a. Masyarakat yang memiliki lahan di kawasan agrowisata agar tetap dapat mengolah lahan pertaniannya untuk meningkatkan hasil produk pertanian yang menjadi daya tarik agrowisata sehingga mendorong rasa memiliki dan tanggungjawab dalam pengelolaan kawasan setempat.
- b. Melibatkan masyarakat setempat secara langsung dalam kegiatan usaha agrowisata yakni sebagai tenaga kerja, baik untuk aktivitas pertanian maupun untuk pelayanan wisata, pemandu dan kegiatan lainnya. Untuk itu perlu ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat setempat.

- c. Menyediakan fasilitas dan tempat penjualan hasil pertanian, kerajinan dan cenderamata bagi masyarakat setempat dalam rangka memperkenalkan produk khas daerah setempat sehingga mendorong meningkatkan penghasilan. Masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam penampilan atraksi seni budaya daerah setempat yang disajikan bagi wisatawan yang datang berkunjung.

7. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) atau seringkali disebut sebagai *Neighbourhood Development* (ND) pada dasarnya adalah peningkatan dari program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan konsep tridaya, dan *good governance* masih dipertahankan keterpaduannya untuk mewujudkan pembangunan berbasis komunitas dan berkelanjutan. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) didasari oleh keinginan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, sehat, tertib, lestari, dan selaras dengan nilai budaya lokal.

Pendekatan yang dilakukan dalam PLPBK ini adalah (KemenPU, 2016):

- a. Pendekatan pemberdayaan

Pemberdayaan di dalam konteks ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang telah menjadi budaya bangsa serta muatan local atau kearifan yang berkembang di dalam

masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi.

b. Pendekatan pembangunan

Pendekatan ini memperhatikan manajemen dari komunitas yang ada, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan bentuk fisik, perencanaan yang dimiliki oleh seluruh stakeholders yang berkepentingan.

c. Pendekatan penghidupan yang berkelanjutan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memperhatikan penghidupan masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Artinya tidak hanya memperhatikan persoalan fisik tetapi juga permasalahan non fisik yang berdampak pada kesejahteraan dalam jangka panjang.

G. Definisi Operasional

Collaborative governance merupakan sebuah yang di dalamnya untuk mengungkap kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Subarsono, 2016). Dimensi kolaborasi yang dipakai di dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Surat Edaran E DJCK No 40 Tahun 2016 meliputi partisipasi, akseptasi, komunikasi, percaya, dan prinsip berbagi. Selain itu juga akan diidentifikasi bentuk-bentuk dari kolaborasi yang telah dilakukan serta pelaku yang terlibat di dalamnya

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Sugiyono, 2012). Objek dari penelitian ini adalah *Collaborative governance* dalam kegiatan pembangunan agrowisata eks lahan lokalisasi Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* serta faktor-menunjang dan menghambat pelaksanaannya pada pembangunan agrowisata eks lahan lokalisasi Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Informan Penelitian

Informan yang ada di dalam penelitian ini adalah meliputi :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

| No | Jabatan | Jumlah |
|------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Kepala Desa | Sunaryo, SE |
| 2 | Tokoh Masyarakat/Tokoh Warga | H.Solihin Bpk.Markaban Ibu.Sundari, S |
| 3 | Ketua Lembaga/Ormas | M.Yani Aji Damanhuri Nasuha |
| 4 | Swasta | Nasution Pempa Dw (Bank) |
| 5 | Masyarakat Umum | Marsudi Binti M Sunaryo Elisa R |
| Jumlah Informan | | 13 Orang |

3. Jenis Dan Sumber Data

Sesuai dengan desain penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari informan penelitian berupa petikan hasil wawancara. Selanjutnya data kedua adalah data sekunder sekunder yang diperoleh dari pemerintah desa terkait masalah pembangunan agrowisata eks lahan lokalisasi Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data penelitian dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Tehnik Observasi

Observasi merupakan model pengumpulan data dengan cara mengamati untuk merasakan dan memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya dalam rangka mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2012). Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian yaitu eks lahan lokalisasi yang dibangun destinasi agrowisata di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo yang mencakup data desa dan kondisi eksisting lahan.

b. Tehnik Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah proses tanya jawab lisan antar pribadi dengan bertatap muka dan dilakukan secara mendetail dan mendalam dan dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian (Sugiyono, 2012). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan masalah pembangunan agrowisata eks lahan lokalisasi Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan dilakukan terhadap personil atau informan penelitian yang telah ditetapkan.

c. Tehnik Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu table cek list, kamera dan *tape recorder*.

5. Tehnik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisa model Miles, Huberman (2007), yang mencakup tiga tahap, yaitu:

a. Pengumpulan data.

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang telah di buat melalui wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan di tempat penelitian.

b. Reduksi dan kategorisasi data

Setelah data dikumpulkan kemudian peneliti melakukan proses penyederhanaan dan pengkategorian data berdasarkan variabel penelitian.

c. Display data, merupakan proses menampilkan data hasil reduksi dan kategorisasi dalam matriks berdasarkan kriteria tertentu.

d. Penarikan kesimpulan, apabila hasil display data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dimulailah penarikan kesimpulan menggunakan teori dan hasil data di lapangan.

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moloeng (2005), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Beberapa macam triangulasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah (Moleong, 2005) :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

b. Triangulasi Penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

